

UNDANG-UNDANG KESEHATAN TERHADAP TINGKAT PELAYANAN TENAGA MEDIS DI PUSKESMAS

Nadila Chairani¹, Reni Agustina Harahap², Widya Kinanti³, Nur Syahidah Hasiah Nasution⁴
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email : nadilachairani10@gmail.com¹, reniagustina@uinsu.ac.id², widyakinanti06@gmail.com³,
Nursyahidahhasiah056@gmail.com⁴

ABSTRAK

Untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum, layanan kesehatan berkualitas tinggi sangat penting. Kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan masyarakat, oleh karena itu peningkatan kinerja memerlukan peran yang efektif sehubungan dengan perundang-undangan kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelayanan kesehatan yang diberikan tenaga medis di Puskesmas dengan undang-undang kesehatan. Metode penelitian menggunakan teknik studi literatur dengan menganalisis beberapa artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis di berbagai Puskesmas sudah menunjukkan pelayanan yang baik meskipun fasilitas sarana dan prasarana sudah cukup memadai namun pemeliharaan yang dilakukan tidak sepenuhnya atau sebagian besar pasien yang menggunakannya. Puskesmas merupakan sumber daya kesehatan masyarakat yang penting di Indonesia karena dapat memberikan pelayanan yang berkesinambungan, menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan kepada masyarakat dalam bidang usaha tertentu dalam bentuk prakarsa kesehatan primer yang berada di bawah pengawasan administratif dan teknis dari Puskesmas. Dengan demikian diharapkan puskesmas mampu memberikan pelayanan baik terhadap pasien dengan berdasarkan undang-undang kesehatan di Indonesia.

Kata kunci: undang-undang kesehatan, pelayanan kesehatan, tenaga medis, puskesmas.

ABSTRACT

To improve the general health and well-being of society, high-quality health services are essential. Service quality has a significant influence on community satisfaction, therefore improving performance requires an effective role in relation to health legislation. The aim of this research is to determine the health services provided by medical personnel at the Community Health Center according to health laws. The research method uses literature study techniques by analyzing several related articles. The results of the research show that the health services provided by medical personnel at various Community Health Centers have demonstrated good service even though the facilities and infrastructure are quite adequate, but the maintenance carried out is not complete or the majority of patients use them. Puskesmas is an important public health resource in Indonesia because it can provide continuous, comprehensive, integrated and sustainable services to the community in certain business fields in the form of primary health initiatives which are under the administrative and technical supervision of the Puskesmas. In this way, it is hoped that the community health center will be able to provide good services to patients based on health laws in Indonesia.

Keywords: health law, health services, medical personnel, health centers.

PENDAHULUAN

Saat ini masyarakat dapat memperoleh informasi dari lebih banyak sumber dibandingkan sebelumnya, termasuk internet dan dunia maya, dan masyarakat menjadi lebih sadar akan hak-hak mereka. Selain itu, masyarakat mempunyai hak atas kesehatan dan masyarakat mempunyai hak atas kondisi kesehatan yang terbaik. Di zaman sekarang ini, pasien tidak lagi pasif, mereka lebih proaktif dan tidak takut memperjuangkan hak atas perlindungan hukum. Sedangkan bagi kesehatan pekerja, hal ini patut menjadi ketakutan

atau momok, karena dokter, perawat, dan bidan hanyalah manusia biasa dengan segala kelebihan dan kekurangannya dalam kehidupan sehari-hari (Rembet, 2022).

Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berfungsi sebagai kerangka legislatif negara untuk penyediaan layanan kesehatan. Undang-undang ini membahas sejumlah topik, termasuk tugas dan hak pasien, standar mutu layanan kesehatan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan kesehatan yang optimal. Pengendalian hubungan dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien merupakan salah satu asas hukum yang tercakup dalam UU Kesehatan tahun 2023. Banyak kendala yang berdampak pada kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan layanan kesehatan di Indonesia (Widjaja, 2023).

Damanik dkk (2024) menegaskan bahwa penyelenggaraan sistem pelayanan kesehatan didefinisikan dalam UURI Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat (2) Tentang Kesehatan sebagai berikut: setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan dengan tujuan untuk memelihara kesehatan masyarakat, dan peningkatan kualitas kesehatan setiap individu melalui pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, dan proses pemulihan penyakit, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Istilah “kualitas” pelayanan kesehatan mengacu pada tingkat keunggulan layanan tersebut, yang di satu sisi dapat menghasilkan kepuasan pasien yang sepadan dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk. Namun proses pelaksanaannya tetap berpegang pada standar pelayanan profesional dan kode etik yang telah ditetapkan. Kepuasan pasien dan niat berperilaku dipengaruhi oleh efektivitas kualitas layanan Puskesmas (Jayanti et al, 2023).

Untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum, layanan kesehatan berkualitas tinggi sangat penting. Hal ini dapat dicapai dengan bekerja sama dengan pemerintah, organisasi kesehatan, profesional medis, dan masyarakat untuk menciptakan sistem kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara efektif, dan efisien. Kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan masyarakat, oleh karena itu peningkatan kinerja memerlukan peran yang efektif (Ananda et al, 2023). Segala upaya individu atau kelompok yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit, serta memulihkan kesehatan masyarakat secara individu, keluarga, kelompok, atau komunitas disebut sebagai pelayanan kesehatan (Muhammad et al, 2023).

Salah satu indikator kepuasan yang mempengaruhi niat pasien untuk mengunjungi fasilitas yang memberikan pelayanan medis yang efisien adalah kualitas pelayanan mampu memenuhi kebutuhan dan preferensi pasien untuk meningkatkan kepuasan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan puskesmas melalui perawatan yang unggul. Puskesmas dimaksudkan untuk menghasilkan keunggulan bersaing (*competitive advantage*) dengan pelayanan bermutu, efisien, inventif, dan berkreasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan pasien melalui pelayanan yang luar biasa (Budo et al, 2022).

Agar pasien percaya bahwa layanan yang mereka terima sudah memadai dan dapat diandalkan, layanan tersebut harus tetap dapat diakses, masuk akal, dan berkelanjutan. Penerimaan pelayanan yang baik, aksesibilitas yang memadai, keberlanjutan finansial, dan efisiensi operasional juga perlu diperhatikan. Puskesmas mempunyai peranan penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun tanpa partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan, efektivitas operasional Puskesmas tidak dapat maksimal. Terkait akuntabilitas layanan yang diberikan, masyarakat mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap bagaimana otoritas kesehatan akan memberikan layanannya. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan kepercayaan

masyarakat, setiap Puskesmas perlu berkinerja baik. Puskesmas harus memprioritaskan peningkatan standar pelayanan dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Kerja sama dan keterlibatan aktif masyarakat juga penting dalam kelancaran dan keberhasilan pemberian layanan kesehatan di Puskesmas (Wida & Ida, 2023).

Dari latar belakang tersebut maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran Undang-undang kesehatan terhadap pelayanan tenaga medis di Puskesmas.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (Library research). Proses yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan informasi dari perpustakaan, membaca, membuat catatan, menganalisis, mengumpulkan konsep atau teks, kemudian mengembangkan dan memperjelas informasi atau teks yang dikumpulkan sehubungan dengan masalah utama penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelusuran secara online dan melalui media elektronik di berbagai sumber, antara lain tesis, disertasi, publikasi ilmiah, dan e-book. Kata kunci yang berkaitan dengan variabel penelitian digunakan saat mencari data di Google Scholar. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan kata kunci tersebutlah yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehadiran Puskesmas diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesehatan masyarakat. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan prakarsa kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan yang menekankan pada upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus puas dengan pelayanan yang ada, artinya pelayanan kesehatan harus berkualitas (Shopia et al, 2022)

Tabel 1. Hasil review artikel.

Penulis & Judul Artikel	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
Yusuf Hariyoko, Yanuarius Dolfianto Jehaut, & Adi Susiantoro. "Efektivitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Oleh Puskesmas di Kabupaten Manggarai".	Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas Kabupaten Manggarai.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Energi dan Kesehatan Pasal 11 yang mencantumkan tenaga kesehatan sebagai tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga fisik, tenaga terapi, tenaga teknisi medis, tenaga teknik, biomedis, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lainnya. Kondisi yang menunjukkan permasalahan efektivitas dan mutu pelayanan Puskesmas di Kabupaten Manggarai terbagi dalam empat kategori, yaitu permasalahan kesehatan masyarakat, permasalahan sumber daya kesehatan, permasalahan pencegahan dan pengendalian penyakit, serta permasalahan industri pelayanan kesehatan. Selain isu-isu dalam empat kategori di atas, keluhan pelanggan layanan kesehatan

		juga sering disampaikan. Selain sikap dan perilaku administrasi, sikap dokter dan perawat biasanya menjadi fokus. Fasilitasnya juga kurang memadai dan lesu.
Sri Lestari “Kajian UU Cipta Kerja Terhadap UU Kesehatan dan UU Tenaga Kesehatan”	Tujuan penelitian ini yaitu untuk lebih memahami dampak UU Cipta Kerja terhadap sektor kesehatan, penulis akan melihatnya dari sudut pandang regulasi dan berbasis masyarakat.	Dalam rangka mendorong laju pembangunan nasional di bidang kesehatan, upaya penataan berbagai komponen hukum dan organisasi akan terus dievaluasi, ditingkatkan, dan diperluas. Ada sedikit perubahan di bidang kesehatan yang terdapat pada UU Cipta Kerja terkait dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Perubahan tersebut terutama terkait dengan pelayanan kesehatan medis yang dibebaskan dari PPN dan diberikan kepada sejumlah pekerjaan selain tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Namun demikian, sistem akreditasi rumah sakit telah diperbaiki, dan diharapkan bahwa persyaratan akreditasi rumah sakit setiap tiga tahun akan meningkatkan kualitas layanan rumah sakit yang diberikan kepada masyarakat karena kualitas layanan ditegakkan secara konsisten.
Sinta Nurul Utami & Suwardi Lubis. “Efektivitas Akreditasi Puskesmas Terhadap Kualitas Puskesmas Medan Helvetia”	Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Medan Helvetia	Hasil penelitian menunjukkan keunggulan maupun efektifitasnya, karena pelayanan merupakan hal yang penting untuk terus ditingkatkan, maka Puskesmas secara aktif mencari masukan dari masyarakat dan pengguna layanan sebagai bahan untuk perbaikan layanan. Karena kualitas layanan yang diberikan menentukan kepuasan pelanggan, pemerintah menempatkan kualitas yang tinggi sebagai tolok ukur keunggulan agar dapat bersaing. Fasilitas yang ditawarkan kepada responden umumnya baik, meskipun fasilitas tersebut cukup memadai namun pemeliharaan yang dilakukan tidak cukup untuk sejumlah besar pasien yang menggunakannya di Puskesmas Lapangan Helvetia.
Siti Zubaidah & Harapan Tua. “Efektivitas Pelayanan Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 Di Puskesmas Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir”	Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelayanan yang diberikan Puskesmas Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.	Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, diperoleh bahwa pelayanan kesehatan di Puskesmas Kubu Babussalam sudah efektif. Namun implementasi indikator-indikator tersebut belum berhasil karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan, antara lain kesadaran masyarakat, sarana, prasarana, dan sumber daya kesehatan. Selain pelayanan medis rawat jalan dan rawat inap, Puskesmas Kabupaten Kubu Babussalam juga

		memberikan layanan konseling, layanan laboratorium, dan layanan program lainnya. Sebagai fasilitas yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, penyelenggara Puskesmas mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan dan meningkatkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dalam hal kinerja staf, ketersediaan obat-obatan yang cukup, dan peralatan medis.
Dewi Agustina, Fadya Safira Nasution, & Risky Youlanda. "Efektivitas Prosedur Layanan Kesehatan Publik Literatur Review".	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa sulitnya petugas kesehatan di puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas.	Berdasarkan temuan penelitian, ditemukan bahwa sejumlah faktor, seperti aksesibilitas fasilitas kesehatan, kualitas tenaga kerja, sumber daya keuangan, dan infrastruktur pendukung, mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan layanan kesehatan masyarakat. Kerja sama yang efektif antara masyarakat, penyedia layanan kesehatan, dan pemerintah sebagai regulator diperlukan untuk meningkatkan efektivitas prosedur pelayanan kesehatan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat menjadi model untuk meningkatkan efektivitas protokol layanan kesehatan masyarakat. Ada beberapa kesulitan dan hambatan yang harus dihadapi secara bersama-sama; Namun demikian, terdapat juga peluang yang memerlukan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, tenaga medis, pasien, dan masyarakat umum.

Berdasarkan 5 artikel yang telah direview diketahui bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan tenaga medis di Puskesmas kepada masyarakat sudah dijalankan dengan baik dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan undang-undang kesehatan. Saat ini, keberhasilan pembangunan suatu daerah sangat bergantung pada ketersediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pertumbuhan daerah sangat bergantung pada kemampuannya dalam menyediakan layanan kesehatan guna membina masyarakat yang sehat. Untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, dikembangkan berbagai layanan kesehatan pemerintah dan swasta di setiap daerah (Setiawan et al., 2023).

Penelitian Daeng dkk (2023) menjelaskan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran profesi dapat dikenakan tanggung jawab hukum pidana, tergantung pada jenis pelanggaran dan kerugian yang diakibatkannya. Ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan dan meliputi: (1) tindakan atau perilaku yang melanggar standar yang telah ditetapkan; (2) tindakan atau perilaku yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan; dan (3) perbuatan atau perilaku yang menurut hukum menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, yaitu kerugian yang ditentukan oleh undang-undang dan dapat dipulihkan dengan membebaskan tanggung jawab hukum kepada pelaku dan pihak-pihak yang terlibat melalui jalur hukum.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Negara, tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk menjalani hidup sehat sehingga seluruhnya dapat mencapai derajat kesehatan masyarakat yang sebaik-baiknya. Puskesmas merupakan sumber daya kesehatan masyarakat yang penting di Indonesia karena dapat memberikan pelayanan

yang berkesinambungan, menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan kepada masyarakat dalam bidang usaha tertentu dalam bentuk prakarsa kesehatan primer yang berada di bawah pengawasan administratif dan teknis dari Puskesmas (Hamrana et al, 2022).

Dalam hal sektor pemerintahan yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan daerah, sektor kesehatan menempati urutan kedua (setelah sektor pekerjaan umum). Artinya, dalam parameter otonomi daerah, pemerintah kota dan kabupaten mempunyai tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di daerahnya melalui pelayanan yang memadai. Dalam bekerja, tenaga medis harus mengikuti standar pelayanan yang sama dengan Puskesmas, yaitu menyapa setiap pasien dengan senyuman, sopan, dan sopan santun (5S). Mereka juga harus melakukan pemeriksaan menyeluruh kepada semua pasien yang mencari pengobatan untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan nyaman, memastikan bahwa pasien menerima perawatan terbaik, dan menghindari membuat mereka merasa cemas dengan kondisinya (Muhammad et al, 2023).

Pemenuhan tuntutan kesehatan masyarakat merupakan salah satu cara pemerintah melakukan pelayanan publik. Tujuan reformasi sektor kesehatan adalah menjadikan layanan kesehatan lebih baik dan lebih mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensinya. Akta Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 951/Menkes/SK/VI/2000 menyatakan bahwa “tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal”. Semakin besar kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas, nyaman, dan berorientasi pada kesehatan yang fokus pada kepuasan masyarakat dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat (Muhammad et al, 2023).

KESIMPULAN

Bedasarkan hasil kesimpulan didapatkan penyediaan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan mempengaruhi cara masyarakat memandang pusat kesehatan masyarakat dan mengambil keputusan untuk menggunakannya sebagai sumber layanan kesehatan, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas layanan yang ditawarkan oleh fasilitas tersebut. Tersedianya beberapa pilihan layanan kesehatan dalam satu lokasi memberikan keleluasaan bagi pasien dalam memilih layanan kesehatan yang diinginkan dan diinginkannya. Layanan kesehatan harus meningkatkan kualitas layanan mereka jika ingin menjadi penyedia layanan kesehatan pilihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D., Nasution, F. S., & Youlanda, R. (2023). Efektivitas Prosedur Layanan Kesehatan Publik: Literatur Review. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(2), 1093-1099.
- Ananda, R., Damayanti, R., & Maharja, R. (2023). Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Keperawatan Profesional (KEPO)*, 4(1), 9-17.
- Budo, A., Tulus, F., & TAMPI, G. (2020). Efektivitas Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(94).
- Daeng, Y., Ningsih, N., Khairul, F., Winarsih, S., & Zulaida, Z. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis Di Atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 3453-3461.
- Damanik, L. S., Triana, Y., & Triana, I. (2024). Kewenangan Dokter Gigi Umum Atas Tindakan Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(1), 1322-1330.
- Hamrana, H., Mahsyar, A., & Sudarmi, S. (2022). Efektivitas Pelayanan Kesehatan Pada

- Puskesmas Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(4), 1128-1139.
- Hariyoko, Y., Jehaut, Y. D., & Susiantoro, A. (2021). Efektivitas pelayanan kesehatan masyarakat oleh puskesmas di kabupaten manggarai. *Jurnal Good Governance*.
- Jayanti, R. D., Afifuddin, A., & Abidin, A. Z. (2023). Efektifitas Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. *Respon Publik*, 17(5), 50-61.
- Lestari, S. (2021). Kajian UU Cipta Kerja Terhadap UU Kesehatan dan UU Tenaga Kesehatan. *MAGISTRA Law Review*, 2(01), 21-39.
- Muhammad, S., Ponto, I. S., & Patty, J. T. (2023). Analisis Kinerja Pelayanan Kesehatan Tenaga Medis Di Puskesmas Air Besar Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 10(1), 197-210.
- Rembet, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. *Lex Et Societatis*, 8(2).
- Setiawan, M. D., Fauziah, F., Edriani, M., & Gurning, F. P. (2022). Analisis Mutu Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (A: Systematic Review). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 12869-12873.
- Shofia, A. K. I., Muchsin, S., & Suyeno, S. (2020). Efektivitas Pelayanan Kesehatan dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat (Studi Kasus Pada Puskesmas Tanjunganom Kabupaten Nganjuk). *Respon Publik*, 14(2), 24-34.
- Utami, S. N., & Lubis, S. (2021). Efektivitas Akreditasi Puskesmas terhadap Kualitas Puskesmas Medan Helvetia. *PUBLIK REFORM: JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 8(2), 10-21.
- Wida, W., & Ida, I. J. F. (2023). Efektivitas Dan Efisiensi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas DTP Gununghalu. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(1), 195-209.
- Widjaja, G. (2023). Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Menurut UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2490-2498.
- Zubaidah, S., & Tua, H. (2021). Efektivitas pelayanan Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 di Puskesmas Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(3), 202-208.